PEMERINTAH KABUPATEN
NGANJUK

RENCANA KERJA
(RENJA)
TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Jl. Dermojoyo No. 30 Telp/Fax (0358) 321150 Nganjuk 64418
Website : https://dispendukcapil.nganjukkab.go.id
Email : dispendukcapil@nganjukkab.go.id



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 merupakan Rencana Kerja Tahunan penjabaran dari pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan tetap memperhatikan kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024.

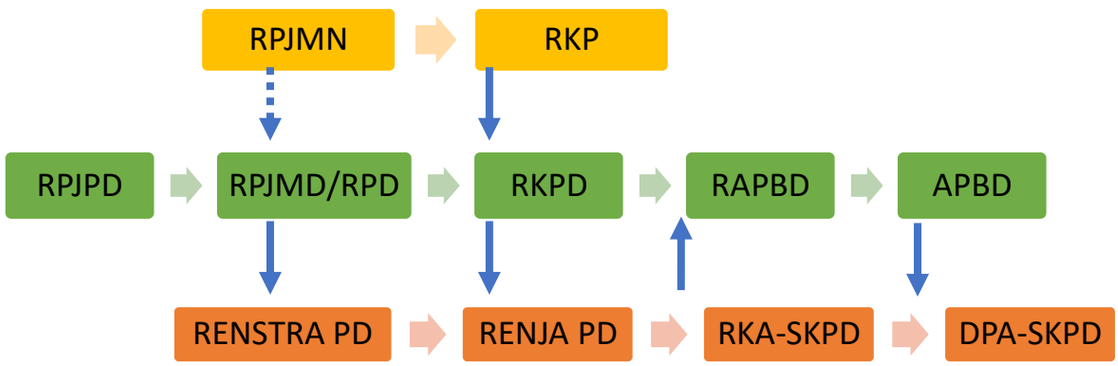
Sejalan dengan kebijakan pemerintah Propinsi Jawa Timur, tolok ukur kinerja pembangunan dilakukan melalui pengukuran 14 indikator makro (makro ekonomi dan makro sosial), yang menempatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada, memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan, melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dalam era globalisasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga mampu meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat demi terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Nganjuk.

Proses penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 didasarkan kepada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas

Pembangunan Jangka Menengah yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, agar didalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud konsistensi antar dokumen perencanaan.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:

diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
20. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
21. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun

2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);

37. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2024;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan
3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Proses penyusunan suatu perencanaan erat kaitannya dengan proses evaluasi. Dari hasil evaluasi dapat teridentifikasi dua hal yaitu sejauhmana proses perencanaan pembangunan dilaksanakan oleh SKPD dan permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan perencanaan pembangunan tersebut. Hasil evaluasi tersebut sangat penting sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 - 2023 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolok ukur untuk menilai sejauh mana perencanaan pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk selaku Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Rencana Strategis tersebut, pada dasarnya akan bermuara pada peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terdiri dari tiga komponen yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli. Berdasarkan hal tersebut maka evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan secara menyeluruh yang dikaitkan dengan ketiga komponen dari IPM tersebut. Kondisi daerah terkait dengan urusan perencanaan pembangunan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerjanya.

Ketersediaan dokumen perencanaan sangat diperlukan untuk menjamin agar program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja OPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Seluruh dokumen perencanaan tersebut, sampai dengan tahun anggaran 2023 telah selesai diantaranya RPJMD Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, Renstra OPD Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD, RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, dan Renja OPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pada tahun anggaran 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan kegiatan yang menunjang tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan dan pencatatan Sipil
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kependudukan dan pencatatan sipil
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun dokumen dimaksud yang sudah diselesaikan adalah:

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
d. Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

e. Renja Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan. Hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tahun berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dengan ruang lingkup kegiatannya sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp 9.510.696.374,- untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa. Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp 7.605.840.658,-, dengan terserapnya anggaran sebesar 79,97%. dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp 5.089.029.000,- untuk belanja gaji dan tunjangan PNS. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp 3.287.352.966,- penyerapan anggaran sebesar 65,24%.
2. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp 4.421.667.374,- untuk belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan dinas. Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp 4.285.787.692,- penyerapan anggaran sebesar 96,93%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp 1.454.596.012,-,- untuk Belanja Modal Peralatan dan mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp 1.449.112.824,-,

dengan terserapnya anggaran sebesar 99,62%. dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp 1.284.596.015,- untuk belanja belanja modal alat kantor dan rumah tangga, belanja belanja modal komputer dan belanja modal peralatan komputer. Belanja Modal Peralatan dan Mesin terealisasi sebesar Rp 1.279.282.824,- penyerapan anggaran sebesar 99,59%.
2. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp 170.000.000,- untuk belanja modal aset tak berwujud. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya terealisasi sebesar Rp 169.830.000,- penyerapan anggaran sebesar 99,90%.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2023, serta pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023
(Target Berdasarkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023)

Kode rekening	Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2021)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target renstra perangkat daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2022)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2022)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9*	*10=(5+7+9)*	*11=10/4*
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
2 12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**		**14.651.995.000**	**7.383.905.670**	**9.160.750.645**	**7.775.670.658**	**85%**	**9.632.786.712**	**24.792.363.040**	**169,21%**
2 12 1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**13.394.995.000**	**6.946.356.870**	**8.658.031.895**	**7.253.249.186**	**84%**	**8.918.937.012**	**23.118.543.068**	**172,59%**
2 12 1 2 1	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun**	**17.500.000**	**332.273.250**	**12.055.100**	**10.352.750**	**86%**	**12.055.100**	**354.681.100**	**2026,75 %**
2 12 1 2 1 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	3.500.000	2.336.450	3.019.000	2.935.500	97%	3.019.000	8.290.950	236,88%
2 12 1 2 1 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3.500.000	49.761.400	3.000.000	-	0%	-	49.761.400	1421,75 %
2 12 1 2 1 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3.500.000	-	3.000.600	1.738.000	58%	3.000.000	4.738.000	135,37%
2 12 1 2 1 5	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	-	2.312.200	-	2.969.250	-	3.000.600	8.282.050	0,00%

2	12	1	2	1	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.500.000	15.951.500	-	-	-	-	15.951.500	455,76%
2	12	1	2	1	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	3.500.000	261.911.700	3.035.500	2.710.000	89%	3.035.500	267.657.200	7647,35 %
2	12	1	2	2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**dokumen administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun**	**5.317.500.000**	**3.852.056.700**	**4.620.880.050**	**3.290.181.966**	**71%**	**4.596.944.450**	**11.739.183.116**	**220,77%**
2	12	1	2	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	5.300.000.000	3.849.742.000	4.617.806.500	3.287.352.966	71%	4.593.871.000	11.730.965.966	221,34%
2	12	1	2	2	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	10.000.000	2.314.700	3.073.550	2.829.000	92%	3.073.450	8.217.150	82,17%
2	12	1	2	2	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	3.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	2	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	2	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-
2	**12**	**1**	**2**	**2**		**Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang disusun**	**7.500.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	12	1	2	2	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-

2	12	1	2	2	2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	2	3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.500.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	5		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**135.000.000**	**67.850.000**	**32.000.000**	**19.095.550**	**60%**	**32.000.000**	**118.945.550**	**88,11%**
2	12	1	2	5	2	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapan nya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	40.000.000	-	32.000.000	19.095.550	60%	32.000.000	51.095.550	127,74%
2	12	1	2	5	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai BerdasarkanTugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	5	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	20.000.000	67.850.000	-	-	-	-	67.850.000	339,25%
2	12	1	2	5	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Fasilitasi dan koordinasi bagian umum yang dilaksanakan**	**3.652.000.000**	**2.115.169.820**	**2.284.659.130**	**3.264.754.640**	**143%**	**2.008.234.844**	**7.388.159.304**	**202,30%**
2	12	1	2	6	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	10.000.000	4.035.900	3.276.500	3.269.600	100%	5.629.700	12.935.200	129,35%
2	12	1	2	6	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1.500.000.000	1.669.806.500	-	1.601.014.550	-	1.601.314.244	4.872.135.294	324,81%
2	12	1	2	6	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	6	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1.700.000.000	62.108.840	2.021.824.750	1.501.511.510	-	75.451.250	1.639.071.600	96,42%

2	12	1	2	6	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	100.000.000	131.346.580	55.942.880	53.381.900	-	118.924.650	303.653.130	303,65%
2	12	1	2	6	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	6	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	3.630.000	3.300.000	2.174.150	66%	6.600.000	12.404.150	248,08%
2	12	1	2	6	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.000.000	244.242.000	200.315.000	103.402.930	52%	200.315.000	547.959.930	313,12%
2	12	1	2	6	10	Penatauasahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	6	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan**	**3.130.000.000**	**-**	**1.348.596.015**	**169.830.000**	**13%**	**1.885.298.218**	**2.055.128.218**	**65,66%**
2	12	1	2	7	1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	600.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	7	5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	150.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	7	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2.000.000.000	-	1.348.596.015	-	-	1.885.298.218	1.885.298.218	94,26%
2	12	1	2	7	7	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	350.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	7	8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	30.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	7	9	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Pengadaan Aset tak berwujud	-	-	-	169.830.000	-	-	169.830.000	-

2	12	1	2	8		**Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**873.800.000**	**488.995.000**	**253.070.000**	**253.280.944**	**100%**	**253.070.000**	**995.345.944**	**113,91%**
2	12	1	2	8	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	485.000.000	211.195.000	7.070.000	4.601.601	65%	7.070.000	222.866.601	45,95%
2	12	1	2	8	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	270.000.000	159.600.000	159.600.000	164.245.928	103%	159.600.000	483.445.928	179,05%
2	12	1	2	8	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan dan Umum Kantor yang disediakan	118.800.000	118.200.000	86.400.000	84.433.415	98%	86.400.000	289.033.415	243,29%
2	12	1	2	9		**Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerin tahan daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang dipelihara.**	**261.695.000**	**90.012.100**	**106.771.600**	**245.753.336**	**230%**	**131.334.400**	**467.099.836**	**178,49%**
2	12	1	2	9	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	78.000.000	58.589.100	48.076.600	72.639.336	151%	62.139.400	193.367.836	247,91%
2	12	1	2	9	3	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	1	2	9	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	11.500.000	20.250.000	11.500.000	11.432.000	99%	22.000.000	53.682.000	466,80%
2	12	1	2	9	7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang pelihara/direhabilitasi	162.195.000	11.173.000	47.195.000	161.682.000	343%	47.195.000	220.050.000	135,67%
2	12	1	2	9	8	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	162.195.000	40.000.000	-	-	-	-	40.000.000	24,66%
2	**12**	**2**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**470.000.000**	**404.471.100**	**253.486.250**	**239.959.950**	**95%**	**361.879.300**	**1.006.310.350**	**214,11%**
2	**12**	**2**	**2**	**1**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**	**400.000.000**	**404.471.100**	**248.042.850**	**237.246.100**	**96%**	**297.713.000**	**939.430.200**	**234,86%**

2	12	2	2	1	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan renta administrasi kependuduk an	25.000.000	-	8.699.050	7.218.500	83%	20.727.700	27.946.200	111,78%
2	12	2	2	1	4	Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	375.000.000	404.471.100	239.343.800	230.027.600	96%	276.985.300	911.484.000	243,06%
2	**12**	**2**	**2**	**3**		**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Jumlah Penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**50.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	12	2	2	3	1	Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	Jumlah dokumen hasil Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk	50.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	**12**	**2**	**2**	**4**		**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**Jumlah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**20.000.000**	**-**	**5.443.400**	**2.713.850**	**50%**	**64.166.300**	**66.880.150**	**334,40%**
2	12	2	2	4	2	Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Jumlahl poran Pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	20.000.000	-	5.443.400	2.713.850	50%	64.166.300	66.880.150	334,40%
2	**12**	**3**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**301.500.000**	**-**	**126.882.300**	**112.913.600**	**89%**	**180.092.750**	**293.006.350**	**97,18%**
2	**12**	**3**	**2**	**1**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Jumlah Pelayanan pencatatan sipil**	**256.500.000**	**-**	**117.181.000**	**108.252.600**	**92%**	**164.323.550**	**272.576.150**	**106,27%**
2	12	3	2	1	1	Pencatatan, penatausaha an dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Jumlah dokumen hasil Pencatatan, penatausaha an dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	75.000.000	-	7.821.000	6.196.000	79%	26.714.600	32.910.600	43,88%
2	12	3	2	1	2	Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil yang ditingkatkan	181.500.000	-	109.360.000	102.056.600	93%	137.608.950	239.665.550	132,05%
2	**12**	**3**	**2**	**2**		**Penyelenggaraan pencatatan sipil**	**Jumlah Penyelenggaraan pencatatan sipil**	**30.000.000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	12	3	2	2	10	Sosialisasi terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	30.000.000	-		-	-	-	-	-

2	**12**	**3**	**2**	**3**		**Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil**	**15.000.000**	**-**	**9.701.300**	**4.661.000**	**48%**	**15.769.200**	**20.430.200**	**136,20%**
2	12	3	2	3	2	Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	15.000.000	-	9.701.300	4.661.000	48%	15.769.200	20.430.200	136,20%
2	**12**	**4**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**445.500.000**	**-**	**122.350.200**	**169.547.922**	**139%**	**171.877.650**	**341.425.572**	**76,64%**
2	**12**	**4**	**2**	**1**		**Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan**	**Jumlah Pengumpulan, pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan**	**60.000.000**	**-**	**89.420.300**	**90.493.500**	**101%**	**125.100.400**	**215.593.900**	**359,32%**
2	12	4	2	1	1	Pengolahan dan penyajiann data kependudukan	Jumlah dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	35.000.000	-	84.442.800	86.802.000	103%	94.226.000	181.028.000	517,22%
2	12	5	2	1	2	Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen Kerjasama pemanfaatan data kependudukan	10.000.000	-	4.977.500	3.691.500	74%	30.874.400	34.565.900	345,66%
2	12	5	2	1	3	Inventarisasi data untuk kepentingan pembangunandaerah	Jumlah laporan hasil data untuk kepentingan pembangunan daerah	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2	3		**Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**Jumlah fasilitasi pihak ketiga yang terlaksana terkait pemanfaatan data**	**367.000.000**	**-**	**32.929.900**	**79.054.422**	**240%**	**46.777.250**	**125.831.672**	**34,29%**
2	12	4	2	3	1	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/ kota dalam penertiban pengelolaan informasi adminduk	Jumlah laporan hasil Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/ kota dalam penertiban pengelolaan informasi adminduk	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2	3	3	Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil Fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	305.000.000	-	32.929.900	79.054.422	240%	46.777.250	125.831.672	41,26%

2	12	4	2	3	4	Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2	3	5	Sosialisasi terkait pengelolaan informsasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil Sosialisasi terkait pengelolaan informsasi administrasi kependudukan	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2	3	6	Kerja sama dengan organisasi kemasyarkat an dan perguruan tinggi	Jumlah dokumen Kerja sama dengan organisasi kemasyarkat an dan perguruan tinggi	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2	3	7	Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertang gungjawab kan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	2.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	**12**	**4**	**2**	**2**		**Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**Jumlah pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan**	**18.500.000**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	-	-
2	12	4	2	2	1	Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	15.000.000	-	-	-	-	-	-	-
2	12	4	2	2	2	Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan	Jumlah dokumen Supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengradilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangun an basis data kependuduk an	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-
2	**12**	**5**				**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**		**40.000.000**	**33.077.700**	-	-	-	-	**33.077.700**	**82,69%**
2	**12**	**5**	**2**	**1**		**Penyusunan profil kependudukan kabupa ten/kota**	**Jumlah data kependudukan kabupaten/kota yang disusun**	**40.000.000**	**33.077.700**	**-**	**-**	-	-	**33.077.700**	**82,69%**
2	12	5	2	1	1	Penyediaan profil data perkembangan kependudukan kabupaten /kota	Jumlah data kependudukan kabupaten /kota	5.000.000	-	-	-	-	-	-	-

2 12 5 2 1 2	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembang an dan proyeksi kependuduk an serta kebutuhan yang lain	35.000.000	33.077.700	-	-	-	-	33.077.700	94,51%

Sumber: Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 Triwulan IV

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.3.
Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program Pendaftaran Penduduk		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Program Pencatatan Sipil		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan II

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Nganjuk berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta target kinerja pelayanan dasar sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, serta Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan bisnis utama (*core bussiness*) dan indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Cakupan penerbitan KTP
   = Jml pend. wajib KTP yg telah melakukan perekaman x 100%
   Jumlah penduduk wajib KTP

   = 256.117 x 100%
   258.029

   = 99,26%

2. Cakupan penerbitan KIA
   = Jml anak usia 0-17 th kurang 1 hari yg memiliki KIA x 100%
   Jumlah anak usia 0-17 th

   = 220.117 x 100%
   240.744

   = 90,43%

3. Cakupan kepemilikan akta kelahiran
   = Jml anak Usia 0-18 th yang memiliki akta kelahiran x 100%
   Jml anak usia 0-18 tahun

   = 288.991 x 100%
   327.987

   = 88,11%

4. Cakupan penerbitan akta perkawinan
   = Jml akta perkawinan yang diterbitkan x 100%
     Jml peristiwa perkawinan yg dilaporkan

   = 14 x 100%
     17

   = 82,35%

5. Cakupan penerbitan akta kematian
   = Jml akta kematian yang diterbitkan x 100%
     Jml peristiwa kematian yg dilaporkan

   = 2.002 x 100%
     2.113

   = 94,75%

6. Cakupan penerbitan akta perceraian
   = Jml akta perceraian yang diterbitkan x 100%
     Jml peristiwa perceraian yg dilaporkan

   = 3 x 100%
     5

   = 60%

7. Cakupan penyajian data kependudukan
   = Jml penyajian data kepend. skala kab/kota dlm 1 th x 100%
     2 (kali/dilaporkan per semester)

   = 2 x 100%
     2

   = 100%

8. Cakupan PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama

   = Jml PD yg tlh memanfaatkan data kepend. Bdsrkn PKS x 100%
     Jumlah seluruh PD

   = 6 x 100%
     7

   = 85,71%

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dunas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk

No.	Indikator	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil													Dinas Dukcapil
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pemenuhan pelayanan administrasi kependudukan	√	-	78%	78,20	78,50	78,70	80	77,28	75,04	80,25	83,88	8010	
2.	Cakupan penerbitan KK	√	-	99,99%	100%	100%	100%	100%	81,13%	74,90%	16,02%	-	100%	
3.	Cakupan penerbitan KTP	√	√	99,79%	99,80%	99,81%	99,82%	99,83%	16,38%	66,50%	8,50%	99.26%	99,90%	
4.	Cakupan kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0 – 18 tahun	√	√	88,25%	88,50%	88,75%	88,90%	90%	86,42%	86,87%	78,36%	88,11%	95%	
5.	Cakupan penerbitan akta kematian	√	-	62%	65%	67%	68%	70%	10%	73,74%	113,25 %	94,74%	100%	

No.	Indikator	IKU	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian				Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
6.	Cakupan penerbitan akta nikah	√	√	70%	72%	75%	77%	80%	100%	100%	100%	-	100%	
7.	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	√	√	10%	20%	30%	30%	40%	9%	11,56%	28,76%	30,11%	40%	
8.	Cakupan Penyajian Data Kependudukan	√	√	1	2	5	7	8	-	-	-	4	8	
9.	Cakupan Pemanfaatan Data Kependudukan	√	√	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Kedudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, merupakan lembaga teknis daerah sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas pokok dan fungsi yaitu:

TUGAS POKOK

" Meningkatkan Birokrasi yang akuntabel dan efektif serta pelayanan publik yang prima."

FUNGSI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan anggaran
b. Pengelolaan keuangan
c. Pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan barang milik negara
d. Pengelolaan urusan ASN
e. Penyusunan perencanaan dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan

f. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan
g. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran penduduk
h. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil
i. Pelaksanaan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
j. Pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan
k. Pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
l. Pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
m. Pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang administrasi kependudukan
n. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Nganjuk	- Masih kurangnya permohonan masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan - Masih kurangnya koordinasi, sinkronisasi dan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait dalam mengatasi permasalahan pelayanan	-Belum optimalnya penerapan Sistem Administrasi Kependudukan - Sosialisasi berbagai kebijakan dibidang administrasi kependudukan ke berbagai kalangan belum maksimal - Keterbatasan kompetensi SDM aparatur pengelola administrasi kependudukan dari tingkat Dinas sampai

		administrasi kependudukan kepada masyarakat - Belum adanya pemutakhiran data kependudukan	dengan Kelurahan/Desa - Belum adanya pranata hukum daerah dan kelembagaan penyelenggaraan administrasi kependudukan yang mampu mendorong penduduk taat melaporkan dan mencatatkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya - Masih adanya lembaga/instansi yang tidak bersedia untuk kerja sama

Permasalah dan hambatan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain :

1. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
2. Terbatasnya material/ bahan
3. Masih terbatasnya kapasitas SDM
4. Kesadaran petugas untuk melayani secara optimal masih kurang

Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGD's)

Visi pembangunan jangka panjang Kabupatan Nganjuk yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah "Nganjuk Yang Maju, Adil, dan Sejahtera", dan dijabarkan dalam Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Nganjuk yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beretika dan berbudaya.
2. Mewujudkan Nganjuk yang berdaya saing.
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

4. Mewujudkan masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum yang didukung oleh profesionalisme aparatur.
5. Mewujudkan Nganjuk yang aman, tenteram, tertib, dan damai.
6. Mewujudkan Nganjuk yang asri, nyaman, dan lestari.

Dalam pencapaian Visi dan Misi pembangunan jangka panjang dimaksud dijabarkan dalam RPD Tahun 2024-2026 dengan tujuan pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing.
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang akuntabel.
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya, serta tangguh.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah melalui reformasi birokraasi yang akuntabel.

Dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal beberapa hal yang perlu mendapat perhatian adalah:

(Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan pemangku SPM)

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.

3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.
8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.

17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) memberikan kontribusi terhadap tujuan :

"Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik."

Tantangan dan Peluang Dalam Peningkatan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil :

1. **Percepatan pelayanan / penerbitan dokumen kependudukan;**

   Sesuai dengan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pencatatan Sipil Tahun 2016 yang dilaksanakan di Pekanbaru tanggal 24-26 Agustus 2016 dengan tema "**Menuju Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang Membahagiakan Rakyatnya melalui Pelayanan Pencatatan Sipil yang Inovatif, Mudah, Cepat, Akurat, dan Gratis"** dengan tujuan meneguhkan kembali koordinasi pusat-daerah dan memastikan pelayanan publik bidang Administrasi Kependudukan sudah dilakukan dengan wajah baru yaitu yang berisi kemudahan dan memotong prosedur yang tidak perlu karena database kependudukan yang sudah semakin baik serta untuk membangun jiwakorsa dukcapil yaitu semangat untuk saling membantu, tidak mementingkan diri sendiri, penuh inisiatif dan memiliki loyalitas dan membangun kesadaran kembali demi pelayanan yang lebih baik.
2. **Kolaborasi** atau kerja sama dengan steakholder terkait pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu upaya peningkatankualitas pelayanan;
3. **Jangkauan** atau pendekatan layanan administrasi kependudukan juga merupakan upaya peningkatan pelayanan publik dalam bidang administrasi kependudukan.

Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindaklanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

1. Sosialisasi berbagai kebijakan dibidang administrasi kependudukan ke berbagai kalangan belum maksimal.

Pemahaman masyarakat dan aparat tentang pendaftaran penduduk maupun pencatatan sipil umumnya masih sering terjadi adanya kerancuan, meskipun keduanya ada keterkaitan tetapi masing-masing merupakan domain yang berbeda.

2. Pendaftaran penduduk lebih ditekankan kegiatan administratif untuk identifikasi penduduk menurut domisili, sedangkan pencatatan sipil menekankan kepada aspek hukum yang menentukan status keperdataan seseorang atas peristiwa yang dialaminya. Sebagai pembuktian status diterbitkan dokumen kependudukan yang mensyahkan perubahan akibat peristiwa penting atau peristiwa kependudukan yang dialami penduduk.
3. Kerangka sistem hukum dan peraturan perUndang-undangan
   Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya merupakan landasan yang sangat kuat untuk penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia, akan tetapi pada tataran implementasi di daerah masih belum dilaksanakan secara menyeluruh dalam artian belum seluruh kabupaten/kota menyesuaikan Perda yang mengacu pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan pelaksanaannya, untuk dijadikan landasan operasional penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah.
4. Belum optimalnya Penerapanan Sistem Administrasi Kependudukan, yang saat ini terus menerus dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Masih lemahnya/kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan. Hal ini terjadi karena ternyata masih dijumpai penduduk atau masyarakat yang enggan untuk mengurus dan melaporkan perubahan peristiwa kependudukan dan perubahan peristiwa penting yang lainnya, yang meliputi perubahan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), maupun perubahan akta kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, dan yang lainnya dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

6. Keterbatasan kompetensi SDM aparatur pengelola tertib administrasi kependudukan dari tingkat Dinas sampai dengan Kelurahan/Desa.

Tabel 2.7
Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) di Kabupaten Nganjuk Sampai Tahun 2022

No.	Tujuan/Target/Indikator	Satuan	Baseline (2018)	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Catatan Penting
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	

Sumber: Hasil Evaluasi Capaian TPB Perangkat Daerah Tahun 2022

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat tiga hal yaitu :

1. Rancangan kerangka ekonomi daerah
2. Program prioritas pebangunan daerah dan
3. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Selanjutnya tiga hal tersebut dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Kabupaten Nganjuk berdasarkan RKPD Kabupaten Nganjuk yang sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se Kabupaten Nganjuk yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah KabupatenNganjuk.

Untuk membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan tabel berikut :

Tabel 2.8
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program /Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	**Kab. Nganjuk**			**12.942.552.723**	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**Kab. Nganjuk**			**12.942.552.723**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				**12.942.552.723**	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				**12.942.552.723**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		**Prosentase kegiatan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan**		**11.121.000.273**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**		**Prosentase kegiatan penunjang urusan pemerintah yang dilaksanakan**		**11.121.000.273**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**8 Dokumen**	**15.055.000**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**		**15.055.000**	

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3.020.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dokumen	3.020.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen RKA_SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunandokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen RKA_SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunandokumen RKA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasipenyusunan dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasipenyusunan dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	Laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	3.000.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	Laporan	3.035.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen	3.035.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					**4.849.850.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**4.849.850.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	40	Orang/ Bulan	4.846.750.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	4.846.750.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1	Laporan	3.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 dokumen	3.100.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**1**	**Dokumen**	**90.000.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**		**90.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	40	Paket	40.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	40 stel	40.000.000	

	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan	100	Orang	50.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan	5 Kegiatan	50.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**26**	**Paket**	**2.283.095.273**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**		**2.283.095.273**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1	Paket	5.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Lisrtik/Penerangan Bangunan Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10 jenis	5.000.000	
	Peyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	4	Paket	2.030.500.000	Peyediaan Bahan Logistik Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	46 jenis	2.030.500.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan logistik kantor	2	Paket	92.595.273	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya bahan logistik kantor	14 macam	92.595.273	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 kali	5.000.000	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	24 kali	150.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Jumlah Barang milik daerah SKPD yang diadakan**	**5**	**Unit**	**2.885.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**Jumlah Barang milik daerah SKPD yang diadakan**		**2.885.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	Unit	1.000.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 unit	1.000.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	31	Unit	1.785.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya peralatan dan mesin lainnya	10 jenis	1.785.000.000	
	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket Mebel yang disediakan	1	Paket	100.000.000	Pengadaan Mebel	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket Mebel yang disediakan		100.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**	**36**	**Laporan**	**605.000.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**		**605.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan,	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	8.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kabupaten/Kota, Semua	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 kali	8.000.000	

		Semua Kelurahan					Kecamatan, Semua Kelurahan				
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	Tersedianya Jasa Komunikasi, SumberDaya Air dan Listrik	12	Laporan	290.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 kali	290.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	307.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	6 orang	307.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Jumlah barang milik daerah SKPD yang dipelihara**	**6**	**Jenis**	**393.000.000**	**PemeliharaanBarang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Jumlah barang milik daerah SKPD yang dipelihara**		**393.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8	Unit	93.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	93.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35	Unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	35 unit	30.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya	5	Unit	270.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	5 unit	270.000.000	

	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		**Pelayanan, Penataan, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan SPP**		**890.431.550**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**		**Pelayanan, Penataan, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pendaftaran Penduduk sesuai dengan SPP**		**890.431.550**	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**	**3 Dokumen**	**624.767.300**	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**		**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**		**624.767.300**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20 Dokumen	95.258.350	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20 kec	95.258.350	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 Laporan	529.508.950	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 kec	529.508.950	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**	**20 Kecamatan**	**190.518.950**	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**		**190.518.950**	
	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlahlokasi yang dilayani	4 Dokumen	190.518.950	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi yang dilayani	20 kec	190.518.950	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**4 Kali**	**75.145.300**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**		**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan** Pendaftaran **Penduduk**		**75.145.300**	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbinanya dan terawasinya terkait Pendaftaran Penduduk	20 Laporan	75.145.300	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbinanya dan terawasinya terkait Pendaftaran Penduduk	305 lokasi	75.145.300	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		**Pelayanan, Penataan, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil sesuai dengan SPP**		**556.875.700**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**		**Pelayanan, Penataan, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil sesuai dengan SPP**		**556.875.700**	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		**Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**3 Laporan**	**439.112.400**	**Pelayanan Pencatatan Sipil**		**Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**439.112.400**	
	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dari kabupaten dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dari kabupaten dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	5 Laporan	4.598.600	Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dari kabupaten dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dari kabupaten dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	20 lembaga	4.598.600	
	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah yang dilayani secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	20 Laporan	359.863.800	Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah yang dilayani secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	20 kec	359.863.800	

	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi dan peserta sosialisasi	20	Laporan	74.650.000	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah lokasi dan peserta sosialisasi	20 kec	74.650.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**1**	**Laporan**	**117.763.300**	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**		**117.763.300**	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbinanya dan terawasinya Pencatatan Sipil	4	Laporan	117.763.300	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terbinanya dan terawasinya Pencatatan Sipil	20 kec	117.763.300	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		**Tersedianya data kependudukan yang lengkap akurat dan *update***			**244.741.200**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**		**Tersedianya data kependudukan yang lengkap akurat dan *update***		**244.741.200**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		**Jumlah Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**10**	**Data**	**37.856.600**	**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**Jumlah Pengumpulan, Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**		**37.856.600**	
	Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	10	Dokumen	37.856.600	KerjasamaPemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 instansi	37.856.600	

	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		**Jumlah fasilitasi pihak ketiga yang terlaksana terkait pemanfaatan dara**	**100**	**%**	**206.884.600**	**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**		**Jumlah fasilitasi pihak ketiga yang terlaksana terkait pemanfaatan data**		**206.884.600**	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20	Laporan	206.884.600	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20 kec	206.884.600	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					**129.504.000**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**				**129.504.000**	
	Penyusunan Profil Kependudukan			**75**	**Buku**	**129.504.000**	**Penyusunan Profil Kependudukan**				**129.504.000**	
	Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	75	Dokumen	129.504.000	Penyusunan Profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Tersusunnya profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	75 buku	129.504.000	

Sumber: Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk pada tahun anggaran 2024 merupakan kegiatan pendukung pencapaian visi misi Kepala Daerah.

Merujuk dari visi misi kepala daerah maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Ngajuk, dengan sasaran peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan peningkatan tertib administrasi kependudukan.

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari akademisi, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, asosiasi dan/atau organisasi profesi, serta keterwakilan Desa dan/atau Kelurahan yang terkait langsung dengan pelayanan Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, serta hasil pengumpulan, penelitian dan pengamatan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan kesesuaiannya dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.9
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Dispendukcapil**	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan**	**80,30**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dispendukcapil**	**Dokumen perencanaa, dokumen anggaran, dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**10 dok**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 lap	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dispendukcapil**	**Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**22 dok**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispendukcapil	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 org/bl	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dispendukcapil**	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**174 dok**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dispendukcapil	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 paket	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Dispendukcapil	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 org	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Dispendukcapil**	**Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**26 paket**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Lisrtik/Penerangan Bangunan kantor	Dispendukcapil	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	
	Peyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dispendukcapil	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Dispendukcapil**			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispendukcapil	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	
	Pengadaan Mebel	Dispendukcapil	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispendukcapil	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 unit	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dispendukcapil**			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12 laporan	

			Air dan Listrik yang Disediakan		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	
	Pemeliharaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Dispendukcapil**			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dispendukcapil	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispendukcapil	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispendukcapil	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Dispendukcapil**	**Prosentase Cakupan Kepemilikan KIA** **Prosentase Cakupan Kepemilikan KTP**	**50%** **99,50%**	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Dispendukcapil**	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**	**5 dok**	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20 dok	
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 laporan	
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Dispendukcapil**		**2 lap**	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	20 dokumen	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Dispendukcapil**	**Jumlah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**4 dok**	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	20 laporan	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Dispendukcapil**	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**93,50%**	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Dispendukcapil**	**Jumlah penyelenggaraan pencatatan sipil**	**5 dok**	
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	5 Laporan	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	5 dokumen	
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	20 laporan	

	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan atan Pencatatan Sipil	**Dispendukcapil**	**Jumlah penyelenggaraan pencatatan sipil**	**5 dok**	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	20 lap	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Dispendukcapil**	**Jumlah Instansi yang melakukan Pemanfaatan data kependudukan**	**0,27%**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Dispendukcapil**	**Jumlah Pengumpulan, Pemanfaatan, dan Penyajian Database Kependudukan**	**32 dok**	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dok	
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Dispendukcapil**	**Jumlah fasilitasi pihak ketiga yang terlaksana terkait pemanfaatan data**	**70 lap**	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispendukcapil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20 laporan	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Dispendukcapil**	**Jumlah Perkembangan data kependudukan tiap tahun**	**1.191.828 data**	
	Penyusunan Profil Kependudukan	**Dispendukcapil**	**Jumlah data kependudukan kabupaten/kota yang disusun**	**2 dok**	
	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dispendukcapil	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	75 dok	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2019-2025 dan dalam rangka untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan tahun 2024, maka arah kebijakan pembangunan bidang Kependudukan difokuskan pada penataan administrasi kependudukan dengan meningkatkan kualitas layanana dministrasi kependudukan dan melaksanakan sosialisasi administrasi kependudukan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, maka perlu dijabarkan kembali menjadi tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2022, yaitu:

Tujuan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah : *Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan*, dengan indikator Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan

Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk yaitu :

a. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan, dengan indikator kinerja :
   - Cakupan Kepemilikan Dokumen KTP
   - Cakupan Kepemilikan Dokumen KIA
   - Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun
b. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan dan Informasi Data Kependudukan yang valid dan *Update*, dengan indikator kinerja :
   - Prosentase Perangkat Daerah yang Melakukan Perjanjian Kerja Sama
   - Jumlah Data Kependudukan *Update* SIAK Terpusat.

Dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Kependudukan	Indeks Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan	3,51 [B]
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2024**
1. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan : - Cakupan kepemilikan KTP - Cakupan kepemilikan KIA - Cakupan kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-18 Tahun	 99,50% 50,00% 93,50%
2. Meningkatnya Pemanfaatan data kependudukan dan informasi data kependudukan yang valid dan *update*	- Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan perjanjian kerja sama - Jumlah data kependudukan *update* SIAK terpusat	0,33% 1.248.581 data

Sumber: Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk adalah *Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023, pelaksanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk tahun 2024 ditunjang juga dengan Belanja Operasi yang anggarannya untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal yang terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin dan Belanja Aset Tetap Lainnya, dengan ruang lingkup kegiatannya. Selanjutnya, kebijakan operasional dalam menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 direalisasikan melalui program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
   Kegiatan:
   - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 15.055.000.,-
     Sub. Kegiatan:
     a) Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
        Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.020.000,-. Kegiatan ini menghasilkan perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu.
     b) Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD
        Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,-. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu Penyusunan dokumen Renja, Renstra, Sakip.
     c) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
        Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,-. yang dipergunakan untuk Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran.

d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.000.000,-. yang dipergunakan untuk Penyusunan dokumen dokumen perencana, dokumen anggaran dan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun.

e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.035.000,-.Yang dipergunakan untuk Penyusunan LKPJ, LPPD, LKjiP.

Kegiatan**:**

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 4.849.850.000,-

Sub. Kegiatan:

a) Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp ,4.846.750.000,-. Kegiatan ini diperuntukan untuk belanja gaji dan Tunjangan ASN.

b) Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 3.100.000,-. Kegiatan ini ditujukan untuk penyusunan laporan keuangan akhir tahun.

Kegiatan**:**

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 90.000.000,-

Sub. Kegiatan:

a) Pengadaan Pakaian Dinas Berserta atribut kelengkapannya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 40.000.000,-. Kegiatan ini untuk pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

b) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 50.000.000,-. Kegiatan ini untuk sosialisasi perangkat daerah

Kegiatan:

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

  Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 2.283.095.273,- .

  Sub. Kegiatan:

  a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,-. Kegiatan ini untuk pembelian peralatan listrik

  b) Penyediaan bahan logistik kantor

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 2.030.500.000,-. Kegiatan ini untuk belanja logistik kebutuhan kantor.

  c) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 92.595.273,-. Kegiatan ini diperuntukkan bagi belanja barang cetak dan penggandaan.

  d) Fasilitas kunjungan tamu

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 5.000.000,-. Bentuk kegiatan ini berupa biaya mamin dan snack tamu.

  e) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 150.000.000,-. Bentuk kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kecamatan dalam daerah.

Kegiatan:

- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

  Kegiatan ini dianggarkan Rp 2.885.000.000,-

  Sub. Kegiatan:

  a) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.000.000.000,-. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagai penunjang kelancaran dalam pelayanan pada masyarakat.

  b) Pengadaan Mebel

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,-. Bentuk kegiatan ini berupa pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebagai penunjang kelancaran dalam pelayanan pada masyarakat.

c) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 1.785.000.000,-. Bentuk kegiatan ini adalah Pengadaan Peralatan Komputer server, Komputer PC, Printer dan lain-lain.

Kegiatan**:**

- Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dianggarkan Rp 605.000.000,-.
Sub. Kegiatan:

a) Penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 8.000.000,-. Bentuk kegiatan ini untuk biaya jasa surat menyurat

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 290.000.000,-. Kegiatan ini untuk biaya pembayaran listrik, telepon, Internet dan *Website*

c) Penyediaan jasa Pelayanan umum kantor
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 307.000.000,-. Kegiatan ini untuk belanja gaji *cleaning service* dan penjaga malam

Kegiatan**:**

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 100.000.000,-
Sub. Kegiatan:

a) Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 93.000.000,-. Kegiatan ini untuk biaya pembayaran pajak tahunan dan Pemeliharaan Kendaraan dinas operasional.

b) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 30.000.000,-. Kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan peralatan kantor. berupa mesin AC, televisi, Komputer, printer, Fax dll.

c) Pemeliharaan / Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 270.000.000,-. Kegiatan ini untuk biaya pemeliharaan gedung kantor.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Kegiatan:

- Pelayanan Pendaftaran Penduduk

  Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 624.767.300,-

  Sub. Kegiatan:

  a) Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Penduduk

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 95.258.350,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya pelayanan Pendataan Penduduk Non permanen dan rentan administrasi penduduk.

  b) Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 529.508.950,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya pelayanan permohonan pendaftaran penduduk.

Kegiatan:

- Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

  Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 190.518.950,-

  Sub. Kegiatan:

  a) Pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 190.518.950,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya penyusunan dokumen hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendaftaran penduduk.

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

  Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.145.300,-

  Sub. Kegiatan:

  a) Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk
     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.145.300,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya penyusunan Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk.

3. Program Pencatatan Sipil

   Kegiatan:

   - Penyelenggaraan Pencatatan Sipil

     Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 439.112.400,-

     Sub. Kegiatan:

     a) Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil
        Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 4.598.600,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil.
     b) Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil
        Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 359.863.800,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil.
     c) Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
        Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 74.650.000,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil.

   Kegiatan:

   - Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan terkait pencatatan sipil

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 117.763.300,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil.

Sub. Kegiatan:

a) Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil ini dianggarkan sebesar Rp 117.763.300,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Kegiatan :

- Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

Sub kegiatan :

a) Kerja sama pemanfaatan data kependudukan ini dianggarkan sebesar Rp 37.856.600,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya kerja sama pemanfaatan kependudukan.

Kegiatan :

- Penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

a) Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dianggarkan sebesar Rp 206.884.600,-. Kegiatan ini untuk terlaksananya fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan.

5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Kegiatan**:**

- Penyusunan Profil Kependudukan

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 129.504.000,-.

Sub. Kegiatan:

a) Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 129.504.000,- Kegiatan ini untuk biaya cetak Buku Profil Kependudukan sebanyak 78 Exemplar/buku.

3.3.1. Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Untuk pencapaian visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025, telah dirumuskan tema pembangunan daerah dalam RKPD Kabupatan Nganjuk Tahun 2023, yaitu **"Nganjuk yang Maju, Adil dan Sejahtera"**

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup;
2. Meningkatnya kualitas pembangunan manusia yang unggul dan berdaya saing;
3. Meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik;
4. Meningkatnya kondisi sosial masyarakat yang harmonis dan berbudaya.

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut:

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**12.298.613.700,00**							**13.040.222.250,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.298.613.700,00**							**13.040.222.250,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**12.298.613.700,00**							**13.040.222.250,00**	
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan***	**80,40 nilai**			**80,30 nilai**	**10.461.887.900,00**						**80,35 nilai**	**11.157.950.000,00**	

	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Dokumen perencanaa, dokumen anggaran, dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun*	-			10 dokumen	15.344.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	15.600.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3.185.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.200.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	3.047.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.062.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.044.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3.005.550,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun*	-			22 dokumen	4.849.800.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	4.849.850.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	4.846.750.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4.846.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.050.050,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.100.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun*	-			174 dokumen	38.182.250,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	21.600.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	16.582.250,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan*	-			26 paket	2.011.414.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	2.307.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6.804.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.797.194.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.030.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	71.493.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		80.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.300.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.142.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		150.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	32.480.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakam*	-			18 unit	1.985.979.050,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	2.110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	100.092.500,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				71 Unit	1.885.886.550,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		2.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang tersedia*	-			28 laporan	573.352.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	625.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.300.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	301.200.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	264.852.200,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		307.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah barang milik daerah SKPD yang dipelihara*	-			52 unit	987.816.300,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	1.190.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	125.866.300,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		130.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	51.950.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	810.000.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		1.000.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Prosentase Cakupan Kepemilikan KIA*** ***Prosentase Cakupan Kepemilikan KTP***	**100 %** **100 %**			**50,00 %** **99,50 %**	**915.517.700,00**						**99,60 %** **60,00 %**	**924.508.950,00**	

	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah dokumen pendaftaran penduduk*	-			5 Dokumen	628.609.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	629.508.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				20 Dokumen	99.736.650,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				20 Laporan	528.873.050,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		529.508.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	241.782.350,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	245.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				20 Dokumen	241.782.350,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		245.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	*Jumlah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk*	-			4 dokumen	45.125.650,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk														

			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk				20 Laporan	45.125.650,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		50.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Prosentase Cakupan Kepemilikan KTP*** ***Prosentase Cakupan Kepemilikan KIA***	**100 %**			**99,50 %** **50,00 %**	**420.046.900,00**						**94,00 %**	**447.763.300,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*	-			2 Laporan	318.577.200,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	330.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil														

			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil				5 Laporan	4.502.800,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				20 Laporan	283.054.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		290.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				20 Dokumen	283.054.400,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		290.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				20 Laporan	31.020.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil*	-			4 laporan	101.469.700,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	117.763.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				4 Laporan	101.469.700,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		117.763.300,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Jumlah Instansi yang melakukan Pemanfaatan data kependudukan***	**0,47 %**			**0,27 %**	**344.741.200,00**						**0,33 %**	**350.000.000,00**	

	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah Pengumpulan, Pemanfaatan, dan Penyajian Database Kependudukan*	-			10 dokumen	37.856.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				10 Dokumen	37.856.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah fasilitasi pihak ketiga yang terlaksana terkait pemanfaatan data*	-			20 laporan	306.884.600,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk	-	310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				20 Laporan	306.884.600,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Kabupaten Nganjuk		310.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Jumlah Perkembangan data kependudukan tiap tahun***	**1.362.087 data**			**1.191.828 data**	**156.420.000,00**						**1.248.581 data**	**160.000.000,00**	

	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Jumlah data kependudukan kabupaten/kota yang disusun*	-			75 dokumen	156.420.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				75 Dokumen	156.420.000,00	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	PP7 - Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi (e-gov)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		160.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	J U M L A H							**12.298.613.700,00**							**13.040.222.250,00**	

Sumber : SIPD Kemendagri RI

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan...

Tabel 4.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi(2024)
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan	12.942.552.723

Tabel 4.2
Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2023)	Alokasi (2023)
1	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Hasil Reformasi Birokrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	59,46	11.121.000.273
2	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai SPP (KTP, KIA, Akta kelahiran : - Cakupan penerbitan KIA - Cakupan penerbitan KTP - Cakupan kepemilikan akta kelahiran usia 0 – 18 tahun	 50,00% 99,50% 93,50%	1.447.307.250
3	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan informasi	- Prosentase perangkat daerah yang melakukan	0,33%	374.245.200

	data kependudukan yang valid dan *update*	- perjanjian kinerja sama - Jumlah data kependudukan update SIAK terpusat	1.248.581 data	

Tabel 4.3
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2024

No.	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif	Lokasi
		Uraian (Output)	Target		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**12.942.552.723**	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**12.942.552.723**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan**	**80,30**	**11.121.000.273**	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Dokumen perencanaa, dokumen anggaran, dan dokumen evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun**	**10 dok**	**15.055.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 dok	3.020.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dok	3.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dok	3.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2 lap	3.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 lap	3.035.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**22 dok**	**4.849.850.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 org/bl	4.846.750.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 lap	3.100.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**174 dok**	**90.000.000**	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 paket	40.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 org	50.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**26 paket**	**2.283.095.273**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Lisrtik/Penerangan Bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Peyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	2.030.500.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	92.595.273	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	5.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	150.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			**2.885.000.000**	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 unit	1.000.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 unit	100.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	31 unit	1.785.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**8.000.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	290.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, SemuaKelurahan
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	307.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	393.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pemeliharaan Barang Miliik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			**75.000.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Paja, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 unit	93.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit	30.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	270.000.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	**Prosentase Cakupan Kepemilikan KIA** **Prosentase Cakupan Kepemilikan KTP**	**50%** **99,50%**	**890.431.550**	
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah dokumen pendaftaran penduduk**	**5 dok**	**624.767.300**	

	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	20 dok	95.258.350	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	20 laporan	529.508.95	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		**2 lap**	**190.518.950**	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	20 dokumen	190.518.950	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Jumlah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**	**4 dok**	**75.145.300**	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	20 laporan	75.145.300	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	**Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil**	**93,50%**	**556.875.700**	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Jumlah penyelenggaraan pencatatan sipil**	**5 dok**	**439.112.400**	
	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	5 Laporan	4.598.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	5 dokumen	359.863.800	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	20 laporan	74.650.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan atan Pencatatan Sipil	**Jumlah penyelenggaraan pencatatan sipil**	**5 dok**	**117.763.300**	
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	20 lap	117.763.300	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	**Jumlah Instansi yang melakukan Pemanfaatan data kependudukan**	**0,27%**	**244.741.200**	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Jumlah Pengumpulan, Pemanfaatan, dan Penyajian Database Kependudukan**	**32 dok**	**37.856.600**	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	10 dok	37.856.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Jumlah fasilitasi pihak ketiga yang terlaksana terkait pemanfaatan data**	**70 lap**	**206.884.600**	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	20 laporan	206.884.600	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	**Jumlah Perkembangan data kependudukan tiap tahun**	**1.191.828 data**	**129.504.000**	
	Penyusunan Profil Kependudukan	**Jumlah data kependudukan kabupaten/kota yang disusun**	**2 dok**	**129.504.000**	

	Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	75 dok	129.504.000	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan

BAB V
PENUTUP

5.1. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Agar pelaksanaan pembangunan bisa memperoleh hasil yang maksimal khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk maka harus sesuai peraturan perundang-undangan, tetap mengacu pada dokumen perencanaan yang ada, memperhatikan sinergitas antar bidang dan antar instansi terkait, serta rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan itu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 sebagai berikut:

a. Di dalam Penyusunan Renja DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
b. Didalam penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 masih belum sempurna, terkait dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 pemahaman tentang aturan tata cara penyusunan masih berbeda-beda.
c. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan,harus

memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.

5.3. Rencana Tindak Lanjut

a. Perlu peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin komplek. Upaya yang harus ditempuh dapat melalui pendidikan formal, bintek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana.
b. Dalam rangka sinergitas perencanaan harus lebih itensif di dalam melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, agar proses pembangunan yang dilaksanakan agar berdaya guna dan berhasil guna.
c. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan maupun penganggaran, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
d. Dalam menetapkan dokumen perencanaan harus tepat waktu sesuai dengan amanat peraturan perundangan yang berlaku, hal ini dapat dilaksanakan apabila kita mengacu jadual yang telah ditetapkan.

Nganjuk, Desember 2023

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Nganjuk

Drs. GATUT SUGIARTO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690508 198903 1 002